

PROSPEK HUBUNGAN INDONESIA-AUSTRALIA

Humphrey Wangke*)



Abstrak

Australia telah menyelenggarakan pemilihan umum pada tanggal 7 September 2013. Setelah sekian tahun Partai Buruh menguasai pemerintahan, akhirnya Partai Liberal memenangkan pemilu kali ini. Tulisan ini menganalisis antisipasi yang harus dilakukan Indonesia terhadap tampilnya Tony Abbott dari Partai Liberal sebagai perdana menteri baru Australia.

A. Pendahuluan

Hubungan Indonesia dan Australia selama ini sarat dengan nuansa politis sehingga pasang surut hubungan kedua negara seperti *roller-coaster*. Suatu ketika hubungan tersebut sangat baik, namun tiba-tiba saja berubah ke titik yang paling rendah. Hubungan itu pun pada suatu ketika berada dalam posisi stabil di titik keseimbangan selama beberapa waktu. Dalam praktiknya, pasang surut hubungan Indonesia-Australia sangat dipengaruhi oleh rezim yang sedang berkuasa di kedua negara.

Analisis dalam tulisan ini terkait dengan pemilihan umum (pemilu) Australia pada tanggal 7 September 2013. Secara tradisional ada dua pimpinan partai besar sebelum pemilu diselenggarakan, yaitu PM Australia Kevin Rudd (Partai Buruh) dan Tony Abbott (Partai Liberal) yang bertarung memperebutkan kursi

perdana menteri. Berbagai jajak pendapat sebelum pemilu berlangsung memperlihatkan bahwa Tony Abbott berpeluang besar untuk memenangkan pemilu tanggal 7 September 2013. Apalagi ia didukung oleh berbagai media massa.

Partai Liberal pimpinan Tony Abbott pada akhirnya memenangkan pemilu karena dianggap lebih mampu mengelola masa depan perekonomian Australia yang sedang menurun. Meskipun pertumbuhan ekonomi Australia berada pada taraf stabil selama 22 tahun terakhir (2,5%) dan angka pengangguran relatif rendah akan tetapi pemerintahan Kevin Rudd dianggap boros karena mengajukan sistem kesehatan dan pensiun senilai US\$1,5 miliar.

Dalam kampanyenya, Kevin Rudd menjanjikan pemotongan pajak, sementara Tony Abbott dari Partai Liberal menyatakan akan memangkas anggaran belanja pemerintah

*) Peneliti bidang Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: dhanny_2000@yahoo.com



hingga US\$40 miliar. Suatu penghematan yang dianggap akan mampu menstimulir pertumbuhan ekonomi negara itu meskipun akan menyebabkan 12.000 orang kehilangan pekerjaan. Bantuan luar negeri juga akan dikurangi hingga A\$4,5 miliar dan dialihkan untuk proyek infrastruktur dalam negeri. Abbott juga akan mengupayakan pengurangan utang luar negeri hingga A\$16 miliar dalam tempo empat tahun ke depan.

Tulisan ini secara ringkas akan menganalisis kelemahan Kevin Rudd dalam menangani ekonomi Australia hingga menjadikannya kalah dalam pemilu, serta faktor apa saja yang perlu diantisipasi terkait kemenangan PM Tony Abbott.

B. Isu Ekonomi dalam Pemilu

Kevin Rudd berusaha memanfaatkan isu ekonomi sebagai tema utama kampanye demi menghindari kekalahan Partai Buruh dalam pemilu. Ia berupaya mengeksploitasi kecemasan para calon pemilih akan redupnya masa jaya industri pertambangan Australia yang mengancam hilangnya banyak lapangan kerja.

Rudd berharap para pemilih mengingat perannya di masa lalu saat membawa Australia keluar dari krisis keuangan global tanpa mengalami kejatuhan. Namun, pendekatan itu justru berisiko merusak kepercayaan konsumen dan dunia bisnis yang rapuh. Perekonomian Australia berupaya untuk tidak terlalu bersandar pada sektor sumber daya alam di tengah menurunnya permintaan dari China, mitra dagang terbesarnya selama ini.

Dewasa ini sudah banyak perusahaan tambang Australia yang memecat ribuan karyawan pada setahun belakangan saat sejumlah proyek sumber daya selesai dikerjakan. Glencore Xstrata Plc tercatat sebagai perusahaan tambang terakhir yang merumahkan ratusan pekerjanya di Australia. Sementara itu, ada pula perusahaan yang harus berjuang menyelamatkan industri pertambangannya setelah permintaan dari

China dan negara-negara lain melambat. Situasi itu mendorong jatuhnya harga komoditas pertambangan secara tajam.

Sejumlah sektor yang peka terhadap suku bunga, seperti ritel dan manufaktur juga terlambat merespons melambannya sektor pertambangan meskipun tingkat suku bunga telah dipangkas sebanyak tujuh kali sejak akhir tahun 2011. Sentimen usaha dan konsumen juga lemah. Karenanya banyak warga Australia yang cemas dengan situasi ekonomi domestik dan global serta memilih untuk menabung daripada membelanjakan uangnya.

Pada Mei 2013, pemerintah Australia telah memprediksi bahwa negara dengan peringkat ekonomi keduabelas secara global itu akan tumbuh 2,75% pada tahun fiskal mendatang, lebih rendah dari proyeksi sekarang sebesar 3%. Tingkat pengangguran diperkirakan akan meningkat sekitar 5,8% pada pertengahan 2014 dari level sekarang sebesar 5,5%. Perusahaan pialang Goldman Sachs dari Amerika Serikat memprediksi peluang Australia tergelincir ke arah resesi pada tahun mendatang sebesar satu berbanding lima.

C. Prospek Hubungan dengan Indonesia

Ketua Partai Liberal Tony Abbott dalam kampanyenya guna memenangkan pemilu dengan tegas menyebutkan bahwa Asia akan menjadi prioritas kebijakan luar negerinya. Negara-negara prioritas yang dimaksud Abbott ialah Indonesia, China, Jepang, dan Korea Selatan. Negara-negara sekutu yang sudah lama bersahabat dengan Australia seperti Amerika Serikat dan Inggris tidak akan dipinggirkan oleh Abbott dalam kebijakan luar negerinya.

Indonesia, China, Jepang, dan Korea Selatan akan menjadi tempat yang penting bagi kebijakan nasional Australia karena merupakan mitra dagang regional terpenting. Untuk mengimplementasikan kebijakan politik internasionalnya yang baru, Abbott menambahkan bahwa Indonesia akan menjadi prioritas sehingga akan menjadi negara pertama yang akan dikunjunginya.

Namun dalam konteks hubungan bilateral Indonesia-Australia, akan ada dua isu strategis yang harus diselesaikan. *Pertama* adalah isu keamanan. Hal ini terkait dengan rencana Australia untuk memindahkan pangkalan AL-nya dari Sydney ke Negara Bagian Queensland dan Negara Bagian Western Australia. Dengan memindahkan pangkalan itu, personil militer Australia berada lebih dekat dengan medan operasi mereka. Selain itu, kemampuan negara ini untuk melanjutkan operasi di kawasan Asia Pasifik semakin meningkat.

Selain itu, Australia juga berencana memindahkan pangkalan militernya di Darwin, Northern Territory, dan di Broome, wilayah utara Western Australia. Padahal Darwin yang sangat dekat dengan Indonesia, kini menjadi pangkalan ratusan prajurit marinir Amerika Serikat. Pemerintah berharap, relokasi armada AL ke utara dan barat diperkirakan akan rampung pada tahun 2030. Dengan kecanggihan teknologi militer yang dimilikinya, Australia dengan mudah akan mendeteksi setiap dinamika yang terjadi di Indonesia, terutama Indonesia bagian Timur. Indonesia harus yakin bahwa pemindahan pangkalan militer ke Darwin tidak dimaksudkan untuk memata-matai Indonesia.

Kedua adalah masalah pencari suaka. Kedua partai utama yang bersaing dalam pemilu telah berjanji untuk menindak tegas para pencari suaka dan tidak akan diijinkan untuk menetap secara permanen di Australia. Walau pencari suaka datang dalam jumlah yang relatif kecil menurut standar global, tetapi pencari suaka dan pengungsi merupakan isu politik yang peka di Australia dan keamanan perbatasan telah menjadi sorotan menjelang pemilu sejak tahun 2001.

Di bawah Partai Buruh, semua pencari suaka yang tiba dengan menggunakan kapal akan diusir ke Papua Nugini untuk diproses terlebih dahulu. Apabila mereka memang benar dinyatakan sebagai pengungsi, maka mereka akan tetap berada di PNG.

Sementara Partai Liberal akan menunjuk seorang komandan militer yang dapat memimpin operasi penanganan penyelundupan manusia perahu. Partai Liberal juga ingin

membatasi mereka yang mengaku sebagai pengungsi. Jika setelah diproses ternyata memenuhi syarat sebagai pengungsi maka akan mendapat visa kunjungan sementara tiga tahun. Mereka juga dipaksa bekerja untuk mendapatkan tunjangan sosial tanpa hak pertemuan kembali dengan keluarga, hak banding atau hak tinggal tetap. Calon yang permohonannya ditolak tidak mendapat kesempatan untuk banding atas keputusan itu.

Indonesia berkepentingan dengan masalah pengungsi ini agar jangan sampai para pengungsi dikembalikan lagi ke Indonesia. Karena itu penting bagi Indonesia dan Australia untuk bekerja sama memberi penyuluhan kepada warganya mengenai bahaya terlibat dalam penyelundupan manusia. Pencari suaka biasanya berasal dari Afganistan, Myanmar, Iran dan beberapa negara Asia Tengah. Sebagian besar dari mereka memilih Australia sebagai tujuan akhir. Tetapi mereka melakukan transit di Indonesia sehingga muncul kesan seperti Indonesia membantu pengungsian mereka.

Indonesia juga harus berhati-hati dengan rencana Partai Koalisi Liberal-Nasional yang akan menggelontorkan uang ke Indonesia untuk menyelesaikan masalah penyelundupan manusia. Untuk membiayai skema yang dinamai "*regional deterrence*" itu Partai Liberal berencana menganggarkan A\$440 juta. Penggunaan uang sebanyak itu antara lain A\$20 juta akan digunakan untuk membeli kapal-kapal nelayan Indonesia yang sudah rusak agar tidak digunakan untuk menyelundupkan manusia ke Australia.

PM Tony Abbott yang telah memenangkan Pemilu 2013, membuka kemungkinan akan memberikan uang kepada penduduk Indonesia yang mau memberikan informasi soal penyelundupan manusia. Salah satu program yang dirancang adalah "pengawas desa" dengan memberi uang saku kepada "pengawas" di desa-desa sepanjang pantai Indonesia. Para "pengawas" ini bertindak seperti intelijen dan dipakai Australia sebagai "mata dan telinga di lapangan."

Selain itu, Pemerintahan Partai Liberal juga berencana untuk mengirim polisi federal

Australia ke Indonesia, Malaysia, dan Sri Lanka, guna bekerja sama dengan aparat setempat dalam memerangi penyelundupan manusia. Untuk program ini, Partai Liberal mengalokasikan dana hingga A\$67 juta. Prinsip yang digunakan Abbott adalah “Lebih baik menghabiskan beberapa ribu dolar di Indonesia daripada menghabiskan jutaan dolar untuk memproses imigran gelap yang tiba di sini.”

D. Penutup

Indonesia harus bersikap lebih hati-hati terhadap pemerintah partai Liberal yang telah memenangkan kursi perdana menteri Australia. Bisa saja banyak kebijakan yang akan diambilnya lebih ekstrim dibandingkan dengan Partai Buruh. Sikap Indonesia ini sudah harus disampaikan pada saat Tony Abbott mengunjungi Indonesia pada kesempatan pertama seperti yang diucapkan pada saat berkampanye.

Rujukan:

1. “Australia Bersikukuh Soal Pencari Suaka,” *Kompas*, 22 Agustus 2013, h. 9.
2. “Australia Pindah Pangkalan AL,” *Kompas*, 28 Agustus 2013, h. 9.
3. “Dibawah Abbott Bantuan LN Dikurangi,” *Kompas*, 6 September 2013, h. 10.
4. “Kevin Rudd Berjuang Tangkal Kekalahan,” *Media Indonesia*, 2 September 2013, h. 12.
5. “Lembaga Pencari Fakta Pun Menjadi Saksi,” *Kompas*, 2 September 2013, h. 10.
6. “Preferensi dan Kampanye Media,” *Kompas*, 1 September 2013, h. 10.
7. “Rudd Kecam Program Abbott,” *Media Indonesia*, 6 September 2013, h. 13.
8. “Surf Town’s struggle shows Rudd Hurdle to save seats,” *Jakarta Post*, 6 September 2013, h. 13.